

TESIS

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**



Disusun Oleh :

Nama : WAHYU DONRI TINAMBUNAN

NIM : 115201721/PS/MIH



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : WAHYU DONRI TINAMBUNAN
Nomor Mahasiswa : 115201721/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul tesi : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.	20/12	
Y. Hartono. SH., M.Hum	21/12	

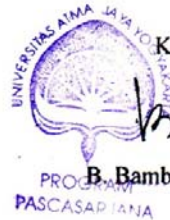


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : WAHYU DONRI TINAMBUNAN
Nomor Mahasiswa : 115201721/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Pekanbaru

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum (Ketua)	14/01-2013	
Y. Hartono, SH., M.Hum (Sekretaris)	14/01-2013	
R. Sigit Widiarto, SH., LLM (Anggota)	14/01-2013	



Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum

PROGRAM
PASCASARJANA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul:

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHDI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Adalah asli hasil karya sendiri bukan hasil menjiplak atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Desember 2012

Yang Menyatakan,

Wahyu Donri Tinambunan

INTISARI

Studi dalam penelitian ini mengenai pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pengawasan DPRD, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini tergolong normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan DPRD Kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintahan kota, sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesa, atau teori, akan tetapi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Penulisan ini memiliki beberapa kesimpulan, pengawasan DPRD dapat dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD, faktor yang menjadi kendala pengawasan terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengawasan adalah memberikan pengetahuan para anggota DPRD tentang anggaran, terkait dengan faktor pendidikan ada penyetaraan kompetensi, mengadakan seminar secara rutin, mengaktifkan anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat, memperbaharui pola pikir partai politik, dan sekretariat DPRD menyediakan perpustakaan untuk anggota DPRD.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penulisan ini adalah, Pada proses pelaksanaan diharapkan juga memberikan peranan masyarakat dan media masa untuk berpartisipasi sebagai alat bantu pengawasan DPRD, tujuannya juga mengedepankan proses yang transparan dan terbuka. Pada tahap pelaporan, hendaknya seluruh pihak menyampingkan aspek kepentingan golongan, dimana dijelaskan bahwa hasil dari pengawasan pelaporan pada saat ini belum ada masalah yang cukup berat, mengingat ada hubungan timbal balik antara eksekutif dan legislatif untuk keperluan pemilihan umum, tentunya sikap seperti ini telah mengarahkan pada suatu proses yang tidak benar. Anggota DPRD dapat diberikan pembekalan atau inisiasi yang bersifat akademis bagi anggota DPRD, sebagai bahan peningkatan kemampuan kinerjanya, memilih anggota sekretariat yang sesuai dengan kebutuhan, dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengatur segala urusan anggota DPRD, DPRD disarankan untuk membuka/menyediakan wadah komunikasi yang setiap saat dapat diakses secara mudah, murah dan luas oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan informasi kepada DPRD.

Kata-kata kunci : pengawasan, pengelolaan, keuangan

ABSTRACT

The study in this research on the local legislative oversight of the financial management of local government in the city of Pekanbaru. The problem of this research is how the supervision of the management of regional parliament in the city of Pekanbaru government? What factors are an obstacle supervision of Parliament, and how the efforts made to overcome the obstacles supervision.

This type of research is done in this paper is considered normative legal research that focuses on the positive legal norms and descriptive analytic with respect to laws and regulations governing the supervision of City Council in overseeing the financial management of the city administration, so this study is not to test hypotheses, or theory, but with reference to the laws that exist. Writing has several conclusions, supervision Parliament to do with the stage of planning, execution, and reporting of budgets, supervision constraint factors that comprise the internal constraints and external constraints, and efforts were made to overcome the obstacles of supervision is to provide knowledge about the members of parliament budgetary, educational factors associated with there is equivalency competence, conduct seminars on a regular basis, to enable members of Parliament to meet directly with the community, to renew the mindset of political parties and parliament secretariat provides a library for members of parliament.

The advice can be associated with this paper is, the implementation process is also expected to give the role of the public and the media to participate as a tool for control of Parliament, the goal also emphasizes a transparent and open process. At the reporting stage, all parties should waive aspects of interest groups, which explained that the results of the monitoring report at this time there is no substantial problem, since there is a reciprocal relationship between the executive and the legislature for the purposes of elections, of course, this attitude has led to a process that is not true. Members of Parliament could be given a briefing or academic initiatives for members of parliament, as a performance upgrade, the members of the secretariat in accordance with the requirements, and have high competence in managing the affairs legislators, Parliament advised to open / provide avenues of communication that each as easily accessible, inexpensive, and widely by the people to express their aspirations and information to Parliament.

Keyword : oversight, management, financial

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, bimbingan, serta karunia dan berkat kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota pekanbaru.** Tesis ini dibuat dan disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segenap dukungan dan bimbingan, baik selama proses studi maupun proses penyusunan tesis ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Y. Hartono, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan bagi perbaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak Sigit Widiarto, SH., LL.M., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan bagi penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Bapak Ir. Nofrizal, MM., selaku ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru.
8. Ibu R. Dharma Santi, selaku anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru.
9. Bapak Iis staf Fraksi Demokrat di DPRD Kota Pekanbaru.
10. Terima kasih kepada kedua Orangtua Tercinta Bapak Prof. DR. W.E Tinambunan, Drs., MS., dan Ibu Bernadeth Risma Sipayung, atas cinta kasih dan dedikasi yang besar selama proses perjalanan kehidupan penulis.
11. Terima kasih kepada saudara-saudari tercinta, Rostiana Berliana Tinambunan S.Pi., beserta keluarga, Eviana D. Tinambunan, SE., Riswandi Stefanus Tinambunan, S.Hut., M.Hut., beserta keluarga, dan Harley Tinambunan, S.Sos., MSi.
12. Alexandra Cynthia Devi, SH. Atas doa dan dukungannya.
13. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan Januari 2012, atas motivasi, kritik, saran yang sangat mendukung dan tentunya pemikiran fisioner.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Wahyu Donri Tinambunan

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
INTISARI.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Batasan Masalah	8
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan tentang DPRD	17
1. Pengertian DPRD	17
2. Pimpinan DPRD.....	18
3. Kedudukan dan Fungsi DPRD	19
4. Tugas dan Wewenang DPRD.....	21
5. Hak dan Kewajiban DPRD	22

B. Tinjauan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	30
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	30
2. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	36
3. Unsur Utama Pengelolaan Keuangan.....	37
4. Pemerintah Kota Pekanbaru	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Data	40
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 48
A. Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	 48
1. Pengawasan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	 48
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kota Pekanbaru	54
3. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru	55
4. Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	 72
5. Pengawasan DPRD terhadap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD	 81
B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	 93
1. Hambatan Faktor Internal	95
2. Hambatan Faktor Eksternal.....	98
C. Upaya Mengatasi Kendala Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.....	 101

BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru.....	56
Tabel 2	Susunan Panitia Badan Musyawarah DPRD Kota Pekanbaru	58
Tabel 3	Susunan Keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru dalam Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan	62
Tabel 4	Susunan Keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru dalam Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran	63
Tabel 5	Susunan Keanggotaan DPRD kota Pekanbaru dalam Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.....	63
Tabel 6	Susunan Keanggotaan DPRD kota Pekanbaru dalam Komisi IV Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup	63
Tabel 7	Susunan Panitia Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Pekanbaru....	66
Tabel 8	Susunan Panitia Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru.....	67
Tabel 9	Susunan Panitia Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru.....	70

DAFTAR GAMBAR

Skema 1 50

